
PENYULUHAN PENGENALAN PERPAJAKAN BAGI CALON WAJIB PAJAK SECARA DARING

**IGA Diah Dhyanasaridewi¹⁾, Ayu Fitri Rosianie²⁾, Delfi Yandri³⁾, Maulana Prawira Yoga⁴⁾,
Amirul Wicaksono⁵⁾**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Insitut Teknologi dan Bisnis Swadharma Jakarta

Correspondence author: IGAD Dhyanasaridewi, diah.dhyanasari@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

Tax is one of the mandatory contributions of the community for the economic activities it undertakes. As a form of state revenue, taxes play a massive role and are increasingly becoming a mainstay for the help of running the wheels of government (development and so on). There are several tax functions, particularly budgetary function (source of state revenue) and the regulated function. In addition, the role of taxes is also as a means of implementing various government policies in the economic and social fields. The DGT Ministry of Finance of the Republic of Indonesia conducts tax counseling activities in collaboration with the academic community included in the strategic planning of the DGT Ministry of Finance of the Republic of Indonesia for 2019, namely the theme of increasing tax knowledge and skills where the target is prospective future taxpayers, namely high school students, vocational equivalents and students in Tax Goes To Campus program. Through this activity, the ITB Swadharma Lecturer Team collaboration with KPP Pratama Tambora conducted community service activities by providing counseling regarding the introduction of taxation to prospective taxpayers which was carried out online. The activity was held on October 16 2021 and was attended by around 310 students.

Keywords: *tax, taxpayers, introduction of taxation.*

Abstrak

Pajak merupakan salah satu iuran wajib masyarakat atas kegiatan perekonomian yang dilakukannya. Sebagai salah satu bentuk penerimaan negara, pajak berperan yang banyak dan semakin menjadi andalan untuk kepentingan menjalankan roda pemerintahan (pembangunan dan sebagainya). Ada beberapa fungsi Pajak yaitu fungsi budgetair (sumber penerimaan negara) dan fungsi regulerend (mengatur). Selain itu peranan pajak juga sebagai alat pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial. DJP Kemenkeu RI melakukan kegiatan penyuluhan Perpajakan yang bekerjasama dengan civitas akademik dimana masuk pada perencanaan strategis DJP Kemenkeu RI tahun 2019 yaitu yang bertemakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan dimana sasaran nya ada calon wajib pajak masa depan yaitu para siswa siswi SMA, SMK sederajat dan Mahasiswa dalam program Pajak Goes To Campus. Melalui kegiatan ini Tim Dosen ITB Swadharma bekerjasama dengan KPP Pratama Tambora melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan mengenai pengenalan perpajakan kepada calon wajib pajak yang dilakukan secara daring. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021 dan

diikuti oleh 310 peserta yang merupakan para siswa – siswi dari beberapa SMA se-Kota Tangerang Selatan serta Mahasiswa dari beberapa Kampus.

Kata Kunci: *pajak, wajib pajak, pengenalan pajak*

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (Makabimbang, 2013). Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Lamonge et al., 2016). Pajak bersifat dinamis, karena pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan kemakmuran rakyat (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang- Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional (Aditya, 2021).

Di Indonesia Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Lestari et al., 2013). Direktorat Jenderal Pajak ini bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan.,melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan,merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di

bidang perpajakan,memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.dan melaksanakan administrasi direktorat jenderal (Pujiwidodo, 2009).

Kebutuhan akan pembangunan yang selalu mengalami peningkatan dan permasalahan ekonomi negara membuat pemerintah semakin mengupayakan Optimalisasi Penerimaan Pajak (Astana & Merkusiwati, 2017), tindakan Pemerintah untuk melakukan optimalisasi pendapatan negara dapat terlihat dari berbagai peraturan, kebijakan maupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pajak penghasilan dan dasar penghitungan pajak selalu dioptimalkan.Bagian pada APBN tahun 2020 penerimaan negara sebesar 2.233,2 Triliun dan sebesar 1.865,7 yaitu setara dengan 83,53% merupakan target pendapatan dalam negeri dimana berasal dari penerimaan sektor perpajakan Hanya 16,47% target pendapatan negara yang berasal dari non pajak. Karena itu pentingnya perpajakan dikenalkan dan disosialisasikan sejak dini oleh lembaga otoritas perpajakan di Indonesia, yaitu Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJP Kemenkeu RI) Hal ini wajib dilakukan karena masih banyak masyarakat umum sebagai Wajib pajak yang masih tidak memiliki kesadaran akan pentingnya perpajakan ini, Dari data pada Laporan Tahunan DJP Kemenkeu RI tahun 2019 dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia terhadap kepatuhan di dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan pada tahun 2019 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) ratio kepatuhan Wajib pajaknya baik karyawan ataupun non karyawan sebesar 73,23% dan 75,93%, angka ini masih jauh dari tingkat kepatuhan

maksimal Wajib Pajak Orang Pribadi yang ingin dicapai oleh Pemerintah (Supriyatna & Maria, 2017).

Karena itu diperlukan tindakan nyata dari DJP Kemenkeu RI untuk melakukan kegiatan penyuluhan Perpajakan yang bekerjasama dengan civitas akademik dimana masuk pada perencanaan strategis DJP Kemenkeu RI tahun 2019 yaitu yang bertemakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan dimana sasarannya adalah calon wajib pajak masa depan yaitu para Mahasiswa. Kegiatan ini sudah dilakukan oleh DJP Kemenkeu RI yang bekerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi, yang mana pada tahun 2019 sudah dilakukan sebanyak 1.092 pada calon wajib pajak masa depan (Kelas X-XII SMA dan Mahasiswa)

Untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak, selain dengan iklan, akan lebih baik menggunakan akademisi dalam proses sosialisasinya. Program Tax goes to campus, Pajak Bertutur dan relawan pajak harus terus dijalankan tiap tahunnya. Selain memperluas pengetahuan pajak sejak dini, program ini juga dapat menjadi sarana sosialisasi bagi para wajib pajak dimana nantinya secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Kepatuhan pelaporan SPT yang tidak mencapai target 100% mengakibatkan pajak belum menjadi instrumen yang optimal untuk mewujudkan redistribusi pendapatan dan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Kewajiban perpajakan yang tidak optimal dalam pelaksanaannya dimana tidak semua wajib pajak berpenghasilan di atas PTKP melakukan pelaporan dengan benar.. Hal ini menyebabkan pembangunan yang telah direncanakan menjadi sedikit terhambat

Agar ratio kepatuhan pajak di Indonesia mencapai 100% maka Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI melakukan perencanaan strategis di dalam penyuluhan perpajakan bagi Wajib Pajak Masa Depan yaitu siswa- siswi yang duduk di kelas X-XII atau setara sekolah tingkat menengah atas (SMA) dan sekolah

tingkat menengah Kejuruan (SMK) dan mahasiswa.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Mengingat Himbauan dan situasi pandemi Covid 19 di Indonesia, membuat kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tidak dilakukan secara Tatap Muka Langsung Selanjutnya, sebanyak total 310 peserta PKM yang merupakan para siswa – siswi dari beberapa SMA se-Kota Tangerang Selatan serta Mahasiswa dari beberapa Kampus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan PKM.

Metode yang dilakukan pada kegiatan ini adalah dengan memberikan penyuluhan mengenai perpajakan baik itu fungsi dan kewajiban perpajakan serta ada sesi tanya jawab yang dikemas secara menarik sehingga dapat memancing keingintahuan peserta dalam pendalaman materi. Penyuluhan sendiri di sampaikan oleh Bidang Penyuluhan KPP Pratama Tambora yang di hadiri oleh beberapa orang penyuluh yang didampingi oleh dosen ITB Swadharma dan dibantu pelaksanaannya oleh HIMA Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITB Swadharma.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan rapat-rapat koordinasi dengan mitra kegiatan yaitu KPP Jakarta Tambora terkait jadwal, metode, materi dan narasumber kegiatan PkM Penyuluhan Perpajakan. Hasil tahap ini disepakati pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 13:00 WIB s.d selesai melalui aplikasi Zoom. Materi akan disampaikan oleh Bidang Penyuluhan KPP Pratama didampingi oleh dosen ITB Swadharma dan dibantu pelaksanaannya oleh HIMA Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITB Swadharma

Tahap selanjutnya dilakukan tahapan sosialisasi dan promosi kegiatan melalui pembuatan dan penyebaran *flyer* acara seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Flyer kegiatan

Setelah itu disusun rundown acara agar penyelenggaraan PKM bisa efektif dan efisien. Susunan acara dapat dilihat pada tabel 1.

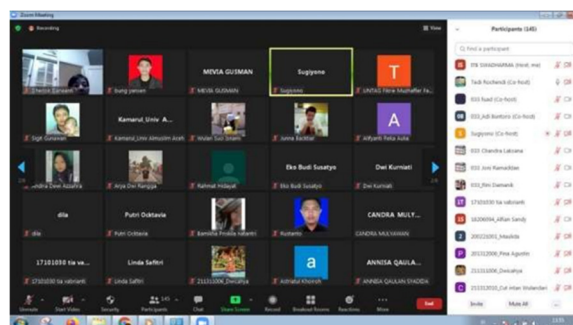
Tabel 1. Rundown Kegiatan Tax Goes To Campus ITB Swadharma 16 Oktober 2021

No	Materi	Durasi	PIC
1	Pemutaran Video Pajak Dirjen Pajak	5 Menit	Moderator
2	Generasi Muda Sadar Pajak	40 Menit	Muhammad Fuad Hassan
3	Pendaftaran Wajib Pajak	10 Menit	Joni Ramaddan
4	Aplikasi M-Pajak	10 Menit	Rini Dewi Yanti Damanik
5	Pemutaran Video M Pajak	5 Menit	Joni Ramaddan
6	Sesi Tanya Jawab	30 Menit	Semua Penyuluh

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan selama 3. (tiga) jam, yaitu jam 13.30-16.30WIB yang diikuti 310 peserta. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) sesi utama, yang dimana, masing – masing sesi dibawakan dan

dipresentasikan oleh setiap Penyuluh Perpajakan ataupun presenter materi topik yang berbeda satu dengan yang lainnya mempresentasikan pengetahuan perpajakan dengan materi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM serta bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP).

Kegiatan ini sendiri dipimpin oleh Kaprodi Akuntansi yang memoderasi kegiatan antara penyuluh perpajakan dari KPP Tambora dengan peserta. Penyuluhan dibuka dengan pemutaran video Pajak Dirjen pajak yang bedurasi 5 menit yang merupakan kata sambutan dari Dirjen Pajak terhadap program Pajak Goes To Campus, setelah itu dilanjutkan dengan penyuluhan mengenai generasi muda sadar pajak yang disampaikan oleh penyuluh dari KPP Tambora Muhammad Fuad Hasan, selanjutnya dilanjutkan oleh penyuluh Joni Ramaddan dengan topik Pendaftaran Wajib Pajak yang berdurasi 10 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan materi Aplikasi M-Pajak yang disampaikan oleh Rini Dewi Yanti Damanik dengan durasi lebih kurang 10 menit yang diikuti dengan pemutaran video M-Pajak. Seluruh sesi telah terselesaikan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Pelaksanaan acara dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Acara

Sementara itu untuk kehadiran peserta dibagikan google form pendaftaran dan pada saat dilakukan webinar panitia juga membagikan presensi kepada peserta untuk diisi yang gunanya adalah sebagai acuan dalam pembuatan sertifikat kehadiran peserta.

D. PENUTUP

Pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan sejak dini yang diberikan bagi calon wajib pajak masa depan sangatlah penting dan kegiatan ini harus secara intens dilakukan setiap tahunnya jangan hanya beberapa saat saja, karena harus memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya perlu ditanamkan kepada calon wajib pajak sejak sedini mungkin sehingga mereka paham mengenai peraturan pajak di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Kami sampaikan terimakasih kepada mitra kegiatan PkM yaitu rekan-rekan di KPP Pratama Jakarta Tambora yang telah menyediakan tenaga penyuluh perpajakan untuk menjadi narasumber sehingga PKM ini dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Aditya, G. N. I. A. (2021). Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 155–162. <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.247>

Astana, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 818–846.

Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>

Lamonge, S. S., Ilat, V., & Kalalo, M. Y. B. (2016). Evaluasi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap. *Jurnal EMBA*, 4(3), 044–055.

Lestari, M., Kertahadi, & Suyadi, I. (2013). Efektifitas Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Studi Kasus KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 6(2), 1–6. <http://pajaksistem.blogspot.co.id/2011/03/sistem-informasi-direktorat-jenderal.html>

Makabimbang, A. F. (2013). Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPH Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 127–133.

Pujiwidodo, D. (2009). Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia Periode Tahun 2000 Sampai Dengan Tahun 2009. *Jurnal Perspektif*, VII(2), 63–75.

Supriyatna, A., & Maria, V. (2017). Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi DJP Online Pelaporan SPT Pajak. *Pros Iding SNATIF Ke -4 Tahun 2017*, 147–154.